

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami perkembangan pembangunan yang sangat signifikan. Salah satu indikator yang biasanya menentukan negara tersebut makmur atau sejahtera yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain digunakan dalam menentukan kemakmuran atau kesejahteraan, indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan sebagai sasaran target pembangunan manusia. Menurut Arifin et.al, (2015) ada beberapa cara yang digunakan dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan melihat indeks pembangunan manusianya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). UNDP mengklasifikasikan indeks pembangunan manusia kedalam empat macam yaitu: *low* (rendah) ($HDI < 60$), *lower-medium* (menengah ke bawah) ($HDI 60-70$), *upper-medium* (menengah ke atas) ($HDI 70-80$) dan *high* (tinggi) ($HDI > 80$) (BPS, 2020).

Pembangunan manusia menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi, terutama karena berkualitas dengan hidup manusia. Sehingga hal tersebut sangatlah perlu untuk diperhatikan terutama bagi Indonesia yang dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Menurut Ginting et.al, (2008) terdapat dua alasan penting yang mendasari dalam melihat perkembangan pembangunan manusia. Pertama, banyak negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak dapat mengurangi kesenjangan

pembangunan manusia. Kedua, sumber daya manusia sebagai input dalam proses pertumbuhan ekonomi, dimana ketika pembangunan manusia berhasil maka kualitas sumber daya manusia semakin baik sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 – 2020 pembangunan manusia meningkat secara signifikan dengan kenaikan rata – rata tiap tahunnya sebesar 0,78%. Diketahui bersama bahwa pada tahun 2020 merupakan awal dari ketidakstabilan perekonomian dunia karena adanya wabah virus *Covid – 19* namun begitu ternyata pemerintah masih tetap bisa mempertahankan dan meningkat walaupun hanya sedikit.

Berdasarkan Grafik 1.1, Indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 71,92 dan pada tahun 2020 indeks pembangunan manusia Indonesia sebesar 71,94, dari hasil tersebut membuktikan bahwa terjadi kenaikan secara signifikan sebesar 0,02. Apabila dihubungkan pada empat klasifikasi yang disebutkan di atas, maka termasuk kedalam klasifikasi *upper medium*/ menengah keatas. Indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada posisi 107 dari 198 negara. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia harus lebih gencar lagi meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia.



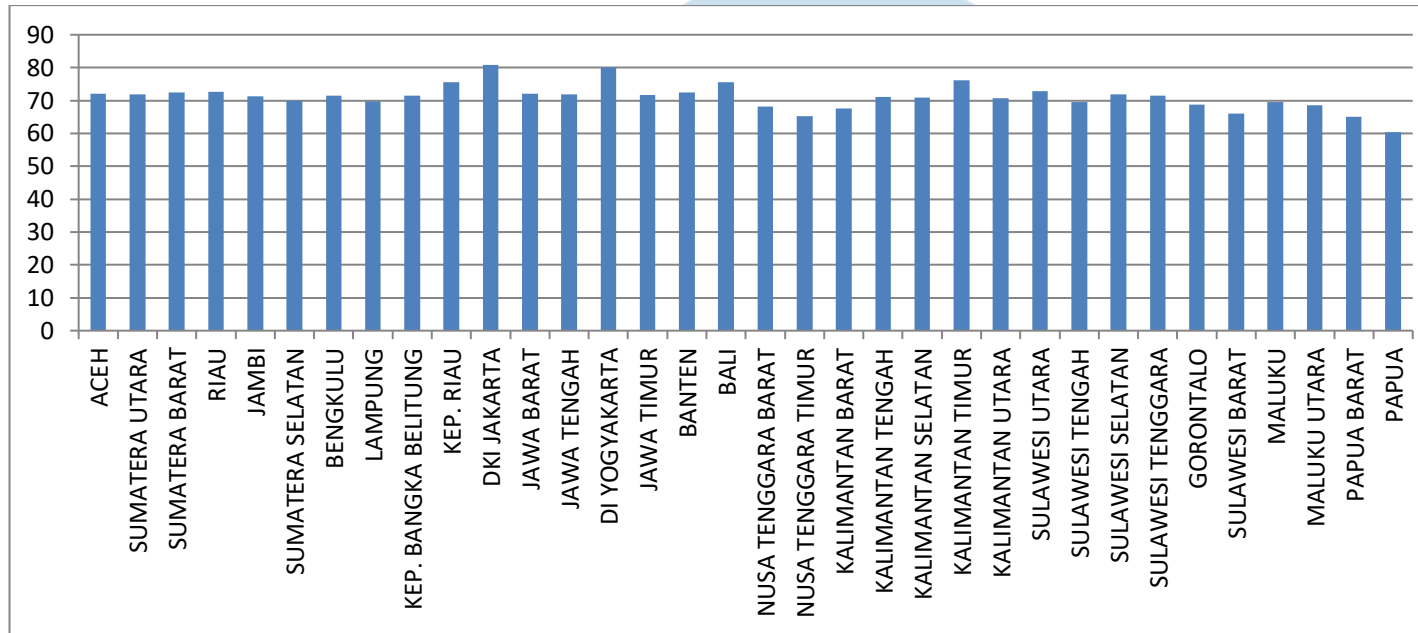
Sumber : Badan Pusat Statistik (2021). Data diolah

Gambar 1. 1

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Tahun 2010 – 2020

Berdasarkan Grafik 1.2 dijelaskan pada tahun 2020 nilai indeks pembangunan manusia di 34 Provinsi Indonesia paling tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 80,77. Urutan kedua IPM paling tinggi yaitu Provinsi DI Yogyakarta dengan hasil sebesar 79,97. dan nilai indeks pembangunan manusia paling rendah yaitu Provinsi Papua sebesar 60,44. Kesenjangan yang terjadi sangatlah besar antara provinsi yang memiliki persentase paling tinggi dengan provinsi yang memiliki persentase paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya pembangunan yang terjadi di setiap provinsi.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021). Data diolah

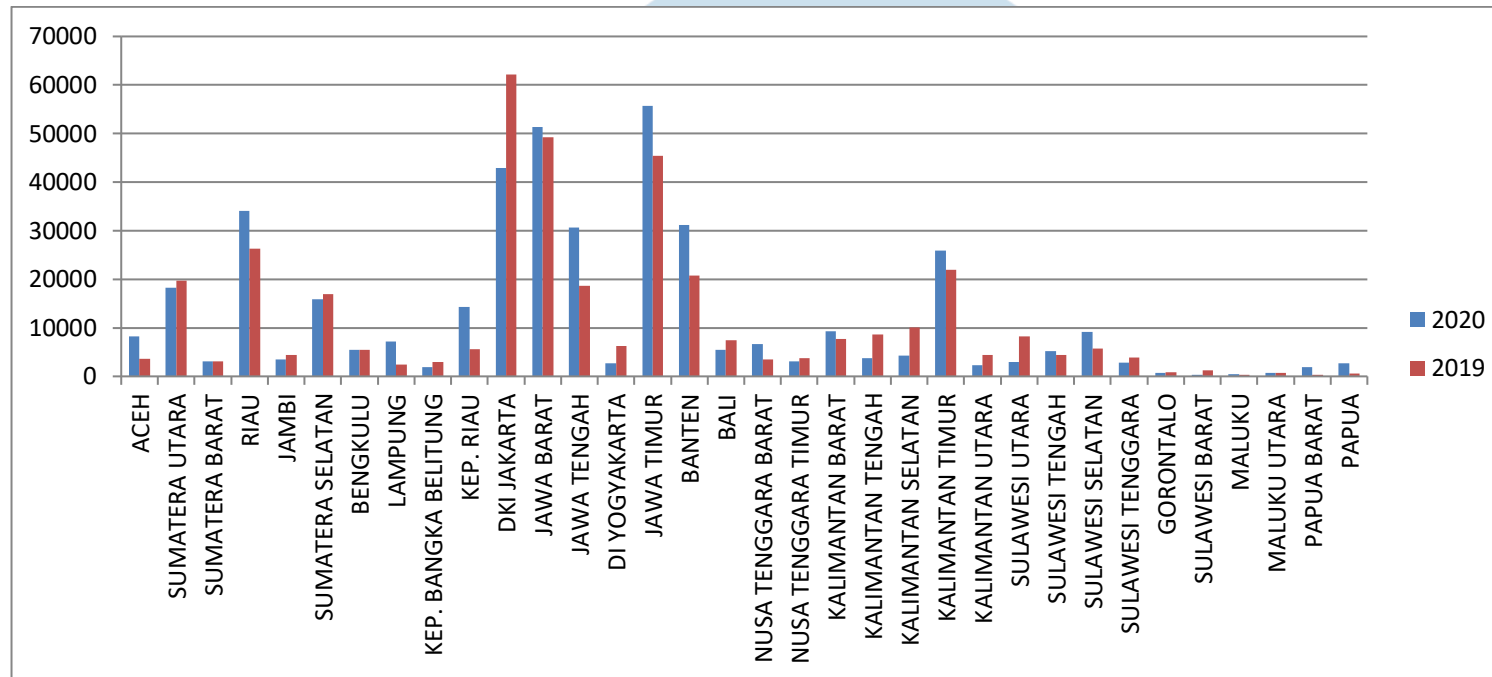
Gambar 1. 2
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2020

Banyak faktor yang dapat digunakan untuk melihat dan menentukan pembangunan manusia di setiap provinsi, yaitu diantaranya investasi, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan indeks kemahalan konstruksi. Investasi atau biasa disebut penanaman modal merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang - barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang (Sukirno S. , 2012). Investasi per kapita merupakan penambahan barang – barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa di masa depan dengan melihat pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Secara matematis dihitung dengan membagi data Investasi dengan jumlah penduduk per tahun. Secara teori, investasi yang masuk ke suatu daerah berarti menambah kapital dalam kegiatan perekonomian. Penambahan kapital ini akan mendorong pembangunan manusia dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Jika arus investasi ke suatu daerah berlangsung terus menerus dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang ada.

Berdasarkan Grafik 1.3 di bawah ini realisasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2019 – 2020 tidak stabil. Hal ini karena terdapat beberapa provinsi seperti Aceh, Riau, Lampung, Kep.Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat yang mengalami kenaikan secara signifikan namun beberapa provinsi lain seperti Sumatera Utara, Jambi, Sumatera

Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa belum meratanya penanaman modal yang dilakukan pemerintah pusat kepada tiap provinsi yang ada. Artinya pemerintah harus tetap berusaha dalam melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia





Sumber : Badan Pusat Statistik (2021). Data diolah

Gambar 1. 3

Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019 – 2020

Adapun faktor lain selain investasi yaitu PDRB. PDRB merupakan faktor yang penting dalam menentukan pembangunan manusia daerah karena PDRB merupakan acuan dalam pemerataan pembangunan suatu daerah (Marsela, 2014). PDRB per kapita merupakan nilai rata – rata pendapatan individu di suatu daerah. PDRB menggambarkan hasil kegiatan perekonomian suatu daerah yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya dalam waktu tertentu sedangkan, PDRB per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. PDRB yang tinggi akan menentukan bahwa daerah tersebut pertumbuhan ekonominya baik. PDRB dibagi kedalam dua bagian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Berikut ini akan ditampilkan data PDRB atas harga konstan menurut provinsi tahun 2020.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa PDRB menurut provinsi dari tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan ini ditandai karena terjadinya krisis yang diakibatkan wabah *Covid – 19* yang mengguncang perekonomian dunia dan membuat penurunan yang cukup besar. Seperti dapat dilihat provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2019 PDRB yang dihasilkan sebesar Rp 173.391.850 dan kemudian di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp 168.416.800. hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang membuat pembangunan manusia tidak baik.

Tabel 1. 1
Nilai PDRB di Indonesia
Menurut Provinsi Tahun 2019 – 2020

Provinsi	PDRB (Ribu Rupiah)	
	2019	2020
ACEH	24587.82	24100.30
SUMATERA UTARA	37048.04	36300.55
SUMATERA BARAT	31649.98	30817.56
RIAU	71086.67	68743.48
JAMBI	41147.56	40362.74
SUMATERA SELATAN	37243.07	36781.73
BENGKULU	23267.68	22941.55
LAMPUNG	28928.50	28201.05
KEP. BANGKA BELITUNG	36231.00	34727.73
KEP. RIAU	83070.63	78038.02
DKI JAKARTA	173918.50	168416.80
JAWA BARAT	30244.84	29142.09
JAWA TENGAH	28570.40	27636.72
DI YOGYAKARTA	27189.54	26190.64
JAWA TIMUR	41557.31	40375.27
BANTEN	35331.45	33531.85
BALI	37513.77	33680.83
NUSA TENGGARA BARAT	18513.33	18196.65
NUSA TENGGARA TIMUR	12716.90	12416.85
KALIMANTAN BARAT	27074.30	26241.42
KALIMANTAN TENGAH	36966.03	35735.33
KALIMANTAN SELATAN	31401.63	30405.72
KALIMANTAN TIMUR	130787.80	124662.80
KALIMANTAN UTARA	82752.52	79040.73
SULAWESI UTARA	35504.56	34849.17
SULAWESI TENGAH	41890.67	43317.32
SULAWESI SELATAN	37340.12	36759.93
SULAWESI TENGGARA	34773.58	33911.70
GORONTALO	23638.54	23305.06
SULAWESI BARAT	23820.06	22834.30
MALUKU	17222.22	16794.24
MALUKU UTARA	21151.39	21793.29
PAPUA BARAT	64684.93	62732.74
PAPUA	39819.54	40075.79

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Selanjutnya ada kemahalan konstruksi, IKK digunakan untuk mengukur letak geografis suatu wilayah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut (Hakim A. , 2017). IKK yang tinggi menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur suatu daerah, sehingga infrastruktur yang buruk mengakibatkan aksesibilitas daerah tersebut sulit dan mobilitas menjadi rendah yang berdampak pada kegiatan perekonomian sehingga akan menghambat daerah dalam proses pembangunan manusia di Indonesia. Perbedaan antara IKK dengan IKK perkapita yaitu IKK hanya melihat secara keseluruhan sedangkan IKK per kapita secara individu yang artinya lebih terfokus melihat pengaruh terhadap individu suatu daerah. Berikut akan disajikan data indeks kemahalan konstruksi menurut provinsi.

Berdasarkan tabel 1.2 di bawah ini indeks kemahalan konstruksi pada tahun 2019 – 2020 mengalami kemajuan dengan mengecilnya nilai indeks kemahalan konstruksi, selain itu data dibawah menggambarkan bahwa kondisi geografis setiap provinsi di Indonesia semakin membaik dan seiring menurunnya IKK ini membuat meningkatnya aksesibilitas antar daerah, walaupun ada beberapa provinsi yang angka IKK nya masih cukup tinggi seperti papua dan papua barat, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang berarti semakin membaiknya kondisi geografis di Daerah Papua dan Papua Barat.

Tabel 1. 2
Indeks Kemahalan Konstruksi di Indonesia
Menurut Provinsi tahun 2019 - 2020

Provinsi	IKK	
	2019	2020
ACEH	98.68	96.38
SUMATERA UTARA	102.79	99.84
SUMATERA BARAT	93.72	92.96
RIAU	94.92	95.72
JAMBI	94.38	90.35
SUMATERA SELATAN	94.50	92.69
BENGKULU	94.74	91.78
LAMPUNG	88.84	88.67
KEP. BANGKA BELITUNG	101.27	101.90
KEP. RIAU	128.34	121.50
DKI JAKARTA	114.06	116.84
JAWA BARAT	103.03	103.93
JAWA TENGAH	99.93	97.31
DI YOGYAKARTA	103.42	102.29
JAWA TIMUR	103.68	102.44
BANTEN	95.84	97.05
BALI	119.10	115.04
NUSA TENGGARA BARAT	98.76	99.13
NUSA TENGGARA TIMUR	99.03	97.95
KALIMANTAN BARAT	111.53	110.92
KALIMANTAN TENGAH	101.90	99.55
KALIMANTAN SELATAN	100.90	100.32
KALIMANTAN TIMUR	114.37	109.69
KALIMANTAN UTARA	112.11	109.90
SULAWESI UTARA	108.32	104.11
SULAWESI TENGAH	91.98	90.74
SULAWESI SELATAN	97.34	95.11
SULAWESI TENGGARA	101.45	101.09
GORONTALO	97.45	94.12
SULAWESI BARAT	92.27	89.48
MALUKU	123.02	124.38
MALUKU UTARA	119.11	120.52
PAPUA BARAT	132.67	129.66
PAPUA	218.59	208.90

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021). Data diolah

Menurut beberapa penelitian terdahulu terdapat dua kemungkinan, yaitu: investasi, produk domestik regional bruto, indeks kemahalan konstruksi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia atau investasi, produk domestik bruto, indeks kemahalan konstruksi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. (Iskandar Muda *et al*, 2014 ; Idris *et al*, 2019 ; Royan *et al*, 2015 ; Priyagus *et al*, 2019)

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas dan juga berdasarkan variabel independen yang terdiri dari investasi, produk domestik regional bruto, indeks kemahalan konstruksi dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen maka penelitian ini ingin melihat **“Pengaruh Investasi Per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, Indeks Kemahalan Konstruksi Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka perumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh investasi per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020?
2. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020?

3. Bagaimanakah pengaruh indeks kemahalan konstruksi per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks kemahalan per kapita konstruksi terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. **Bagi pembaca,** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan, serta informasi yang lebih mendalam mengenai pengaruh Investasi per kapita, PDRB per kapita, Indeks Kemahalan Konstruksi per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
2. **Bagi Peneliti,** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pembandingan atau referensi dalam studi kedepannya yang terkait dengan riset ini dan juga menambah pengalaman dan wawasan peneliti mengenai adanya

dampak Investasi per kapita, PDRB per kapita, Indeks Kemahalan Konstruksi per kapita terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia.

- 3. Bagi Pemerintah,** Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Indeks Pembangunan di Indonesia.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh dan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang dilakukan, maka hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga investasi per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020.
2. Diduga produk domestik regional bruto per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia 2010 – 2020.
3. Diduga indeks kemahalan konstruksi per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010 – 2020.

1.6 Sistematik Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka membahas landasan teori dan studi terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai acuan dasar penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari data penelitian, sumber data tersebut, teknik pengumpulan data, model, alat analisis, definisi operasional.

BAB IV Hasil Pembahasan

Hasil Pembahasan terdiri dari hasil dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yang bersifat terpadu dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB V Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap permasalahan dari penelitian yang dilakukan.